



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2025 Nomor 4);

28. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

BAB II

PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan

Pasal 4

Pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp839.638.295.591,00 (Delapan ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan

Bagian Kedua

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp162.219.492.707,00 (Seratus enam puluh dua milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;

b. Retribusi...

- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 6

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp96.757.242.010,00 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame Rp5.025.875.451,00 (Lima milyar dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- b. Pajak Air Tanah Rp397.079.716,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- c. Pajak Sarang Burung Walet Rp355.281.231,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp3.992.278.309,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp10.439.435.280,00 (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp8.074.682.441,00 (Delapan milyar tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Rp41.246.730.321,00 (Empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);

h. Opsen ...

- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Rp14.770.639.953,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah); dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp12.455.239.308,00 (Dua belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp5.025.875.451,00 (Lima milyar dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp4.625.670.841,00 (Empat milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp322.296.818,00 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp22.502.084,00 (Dua puluh dua juta lima ratus dua ribu delapan puluh empat rupiah);
 - d. Pajak Reklame Selebaran Rp13.248.108,00 (Tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan rupiah); dan
 - e. Pajak Reklame Berjalan Rp42.157.600,00 (Empat puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp397.079.716,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

- (3) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp355.281.231,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp3.992.278.309,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp885.379.893,00 (Delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. Pajak Tanah Liat Rp536.365.923,00 (Lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah); dan
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya Rp2.570.532.493,00 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e direncanakan sebesar Rp10.439.435.280,00 (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f direncanakan sebesar Rp8.074.682.441,00 (Delapan milyar tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak Rp7.738.383.622,00 (Tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah); dan

- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru Rp336.298.819,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g direncanakan sebesar Rp41.246.730.321,00 (Empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman Rp11.990.707.161,00 (Sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik Rp21.000.000.000,00 (Dua puluh satu milyar rupiah);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan Rp4.496.812.134,00 (Empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
 - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir Rp1.237.471.950,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan Rp2.521.739.076,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h direncanakan sebesar Rp14.770.639.953,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i direncanakan sebesar Rp12.455.239.308,00 (Dua belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).

Pasal 8

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp6.507.760.000,00 (Enam milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp3.245.760.000,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp3.262.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp3.245.760.000,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp347.400.000,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp693.360.000,00 (Enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Retribusi Pelayanan Pasar Rp2.145.000.000,00 (Dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah); dan
- d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

(2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp3.262.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah);

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp2.215.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah);
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- f. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah); dan
- g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp189.000.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp2.201.674.758,00 (Dua milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 11

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp56.752.815.939,00 (Lima puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Jasa ...

- c. Jasa Giro Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
- d. Pendapatan Bunga Rp880.000.000,00 (Delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
- f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp229.664.839,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- h. Pendapatan dari Pengembalian Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp53.874.906.000,00 (Lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah); dan
- j. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah Rp198.245.100,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

Bagian Ketiga
Pendapatan Transfer
Pasal 12

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp677.418.802.884,00 (Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Daerah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp613.296.342.000,00 (Enam ratus tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp44.112.785.000,00 (Empat puluh empat milyar seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp396.237.826.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp172.945.731.000,00 (Seratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- (2) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp64.122.460.884,00 (Enam puluh empat milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp64.112.460.884,00 (Enam puluh empat milyar seratus dua belas juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp0,00 (Nol rupiah).

BAB III
BELANJA DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Belanja
Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp803.738.295.591,00 (Delapan ratus tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan

Bagian Kedua
Belanja Operasi
Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp707.000.799.395,75 (Tujuh ratus tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen), yang terdiri atas
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp433.133.527.510,46 (Empat ratus tiga puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah empat puluh enam sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.798.176.685,29 (Dua ratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh

delapan ...

delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.509.095.200,00 (Sebelas milyar lima ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Belanja Modal

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp94.106.344.302,18 (Sembilan puluh empat milyar seratus enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah delapan belas sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.459.780.912,72 (Tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah tujuh puluh dua sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.341.154.873,00 (Lima milyar tiga ratus empat ...

empat puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.275.408.516,46 (Delapan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan ribu lima ratus enam belas rupiah empat puluh enam sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Tidak Terduga
Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp2.631.151.893,07 (Dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh sen), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pembiayaan
Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kedua
Penerimaan Pembiayaan
Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Pengeluaran Pembiayaan
Pasal 20

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar rupiah), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp36.000.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar rupiah).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp35.900.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(35.900.000.000,00) (Minus tiga puluh lima milyar sembilan ratus juta upiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial
7. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus
8. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil

9. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
11. Lampiran IX Rincian Tambahan Dana Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
12. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau pada Daerah Perbatasan dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
13. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
14. Lampiran XII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 30 Desember 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



H. RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



H. TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR



KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	162.219.492.707,00
4.1.01	Pajak Daerah	96.757.242.010,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	5.025.875.451,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.625.670.841,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.625.670.841,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	322.296.818,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	322.296.818,00
4.1.01.09.003	Pajak Reklame Melekat/Stiker	22.502.084,00
4.1.01.09.003.00001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	22.502.084,00
4.1.01.09.004	Pajak Reklame Selebaran	13.248.108,00
4.1.01.09.004.00001	Pajak Reklame Selebaran	13.248.108,00
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan	42.157.600,00
4.1.01.09.005.00001	Pajak Reklame Berjalan	42.157.600,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	397.079.716,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	397.079.716,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	397.079.716,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	355.281.231,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	355.281.231,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	355.281.231,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.992.278.309,00
4.1.01.14.023	Pajak Pasir dan Kerikil	885.379.893,00
4.1.01.14.023.00001	Pajak Pasir dan Kerikil	885.379.893,00
4.1.01.14.030	Pajak Tanah Liat	536.365.923,00
4.1.01.14.030.00001	Pajak Tanah Liat	536.365.923,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.570.532.493,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.570.532.493,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.439.435.280,00
4.1.01.15.001	PBBP2	10.439.435.280,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	10.439.435.280,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.074.682.441,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	7.738.383.622,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	7.738.383.622,00
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	336.298.819,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.002.00001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	336.298.819,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	41.246.730.321,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	11.990.707.161,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	11.554.189.839,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	436.517.322,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	21.000.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	21.000.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	4.496.812.134,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	4.388.403.324,00
4.1.01.19.003.00005	PBJT-Motel	4.991.077,00
4.1.01.19.003.00007	PBJT-Wisma Pariwisata	99.753.232,00
4.1.01.19.003.00009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	3.664.501,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	1.237.471.950,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.237.471.950,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.521.739.076,00
4.1.01.19.005.00001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	796.294.009,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	50.587.193,00
4.1.01.19.005.00008	PBJT-Permainan Ketangkasan	728.471.163,00
4.1.01.19.005.00009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	80.063.590,00
4.1.01.19.005.00010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	42.350.055,00
4.1.01.19.005.00011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	79.440.500,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	744.532.566,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.770.639.953,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	14.770.639.953,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	14.770.639.953,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.455.239.308,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	12.455.239.308,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	12.455.239.308,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.507.760.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.245.760.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	347.400.000,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	347.400.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	693.360.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	693.360.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	2.145.000.000,00
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	1.215.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	315.000.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	615.000.000,00
4.1.02.01.009	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00
4.1.02.01.009.00001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.262.000.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260.000.000,00
4.1.02.02.001.00005	Retribusi Pemakaian Ruangan	260.000.000,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.215.000.000,00
4.1.02.02.002.00002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.215.000.000,00
4.1.02.02.005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.000.000,00
4.1.02.02.005.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	18.000.000,00
4.1.02.02.007	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00
4.1.02.02.007.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	50.000.000,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	500.000.000,00
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	500.000.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	30.000.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	30.000.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	189.000.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	189.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.201.674.758,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.201.674.758,00
4.1.03.01.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.201.674.758,00
4.1.03.01.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.201.674.758,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.752.815.939,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00
4.1.04.01.002.00054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00
4.1.04.03.001	Hasil Sewa BMD	250.000.000,00
4.1.04.03.001.00001	Hasil Sewa BMD	250.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	700.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.002	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.05.002.00001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	880.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	880.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	880.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	220.000.000,00
4.1.04.08.001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	120.000.000,00
4.1.04.08.001.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	120.000.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00
4.1.04.09.001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00
4.1.04.09.001.00001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	229.664.839,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	229.664.839,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	229.664.839,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000,00
4.1.04.15.004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00
4.1.04.15.004.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00
4.1.04.15.008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	150.000.000,00
4.1.04.15.008.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	150.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	53.874.906.000,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	53.874.906.000,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	53.874.906.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	198.245.100,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	198.245.100,00
4.1.04.27.001.00043	Pendapatan Denda Pajak Hotel	15.000.000,00
4.1.04.27.001.00044	Pendapatan Denda Pajak Motel	1.000.000,00
4.1.04.27.001.00045	Pendapatan Denda Pajak Losmen	1.000.000,00
4.1.04.27.001.00048	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	1.000.000,00
4.1.04.27.001.00049	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	3.000.000,00
4.1.04.27.001.00050	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	1.000.000,00
4.1.04.27.001.00051	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.04.27.001.00052	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.04.27.001.00053	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	3.000.000,00
4.1.04.27.001.00054	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000,00
4.1.04.27.001.00055	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	3.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.27.001.00059	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	20.245.100,00
4.1.04.27.001.00062	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.04.27.001.00065	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000,00
4.1.04.27.001.00068	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	30.000.000,00
4.1.04.27.001.00069	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	15.000.000,00
4.1.04.27.001.00070	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00
4.1.04.27.001.00071	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	2.000.000,00
4.1.04.27.001.00072	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	2.000.000,00
4.1.04.27.001.00080	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000,00
4.1.04.27.001.00081	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.000.000,00
4.1.04.27.001.00082	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.04.27.001.00105	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000,00
4.1.04.27.001.00119	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000,00
4.1.04.27.001.00122	Pendapatan Denda PBBP2	50.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	677.418.802.884,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	613.296.342.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.06.002	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	0,00
4.2.01.06.002.00001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	44.112.785.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	12.458.045.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	8.093.619.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	4.364.426.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	30.400.513.000,00
4.2.01.07.002.00002	DBH SDA Gas Bumi	9.129.039.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	68.824.000,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	20.630.459.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	319.785.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	252.406.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	1.254.227.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	1.254.227.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	396.237.826.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	371.139.447.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	371.139.447.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	25.098.379.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	14.400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.002.00003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.157.217.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.541.162.000,00
4.2.01.08.002.00006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	172.945.731.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	65.115.816.000,00
4.2.01.09.001.00003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00
4.2.01.09.001.00013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.920.635.000,00
4.2.01.09.001.00075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00
4.2.01.09.001.00102	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar	62.195.181.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	107.829.915.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	34.619.100.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	387.500.000,00
4.2.01.09.002.00015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.122.032.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.747.800.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	651.500.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.885.136.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.044.013.000,00
4.2.01.09.002.00036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	54.096.527.000,00
4.2.01.09.002.00037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	15.000.000,00
4.2.01.09.002.00040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	225.807.000,00
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.122.460.884,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.122.460.884,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.122.460.884,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.796.204.962,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	205.254.577,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.121.001.345,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00
4.2.02.02.002	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00
4.2.02.02.002.00001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00
	Jumlah Pendapatan	839.638.295.591,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	707.000.799.395,75

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01	Belanja Pegawai	433.133.527.510,46
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	303.130.986.278,31
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	220.039.824.749,45
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	191.429.963.717,55
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	28.609.861.031,90
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.411.582.582,20
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.949.814.513,86
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.461.768.068,34
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.969.353.777,68
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.962.886.350,00
5.1.01.01.003.00002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	6.467.427,68
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.864.003.180,18
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.864.003.180,18
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.480.778.548,88
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.783.238.649,44
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.697.539.899,44
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.483.068.715,56
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.697.257.931,61
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.785.810.783,95
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.167.267.744,57
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.167.267.744,57
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.830.729,55
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.820.250,60
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.010.478,95
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.484.944.485,91
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.167.881.879,14
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.317.062.606,77
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	528.698.357,07
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	459.763.776,45
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	68.934.580,62
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.588.095.241,88
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.381.291.680,96
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	206.803.560,92
5.1.01.01.012	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.102.538.165,38
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	958.924.608,54

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	143.613.556,84
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	101.891.604.817,88
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.765.459.548,28
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	30.895.744.291,28
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	869.715.257,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.289.458.381,57
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9.240.734.874,57
5.1.01.02.003.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	48.723.507,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	85.024.478,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	85.024.478,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.664.949.972,03
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.664.949.972,03
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.086.712.438,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	153.482.220,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	0,00
5.1.01.02.006.00013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	0,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00
5.1.01.02.006.00017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat	0,00
5.1.01.02.006.00018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	0,00
5.1.01.02.006.00019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	607.299.420,00
5.1.01.02.006.00020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	116.318.789,00
5.1.01.02.006.00021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	98.085.009,00
5.1.01.02.006.00025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	54.096.527.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	15.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.658.241.200,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.037.880,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.037.880,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	73.475.480,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	73.475.480,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.048.800,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.048.800,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.684.700,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.684.700,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	319.840,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	319.840,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.380.000.000,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	100.000.000,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	20.000.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	20.000.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.240.000.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	214.010.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	214.010.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	597.237.820,76
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.460.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.460.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	280.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	280.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	806.614,76
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	806.614,76
5.1.01.05.007	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	30.000.000,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	30.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	5.000.000,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	391.727.926,00
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	90.140.353,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00
5.1.01.05.010.00013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00
5.1.01.05.010.00014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00
5.1.01.05.010.00019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	175.667.883,00
5.1.01.05.010.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	68.314.209,00
5.1.01.05.010.00021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	57.605.481,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	651.600.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	12.203.857.393,51
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	12.203.857.393,51
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	12.203.857.393,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.798.176.685,29
5.1.02.01	Belanja Barang	42.480.796.394,35
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	42.149.279.033,35
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	75.018.500,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	103.737.659,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.474.576.349,37
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	24.384.900,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	58.204.000,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.220.921.200,00
5.1.02.01.001.00015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	34.328.300,00
5.1.02.01.001.00016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.825.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.010.752.704,12
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.836.685.395,78
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	91.570.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	819.463.328,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	289.352.154,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	315.543.124,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	780.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.320.684.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	316.049.260,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.947.238.419,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	14.216.020,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.146.452.505,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.005.168.505,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	9.752.000,00
5.1.02.01.001.00045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.257.044.910,08
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.535.787.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.564.640.000,00
5.1.02.01.001.00055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.675.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	357.840.000,00
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	579.748.000,00
5.1.02.01.001.00061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	127.500.000,00
5.1.02.01.001.00062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	236.500.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	304.158.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	263.325.800,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	123.100.000,00
5.1.02.01.001.00068	Belanja Pakaian Siaga	0,00
5.1.02.01.001.00073	Belanja Pakaian KORPRI	27.540.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	170.310.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	565.392.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	723.815.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	186.200.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	331.517.361,00
5.1.02.01.004.00081	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	2.070.000,00
5.1.02.01.004.00103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.100.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.004.00117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.004.000,00
5.1.02.01.004.00120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	210.406.000,00
5.1.02.01.004.00122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00
5.1.02.01.004.00124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00
5.1.02.01.004.00404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	11.600.000,00
5.1.02.01.004.00410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.550.000,00
5.1.02.01.004.00411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	31.830.400,00
5.1.02.01.004.00463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	1.810.000,00
5.1.02.01.004.00494	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	10.338.961,00
5.1.02.01.004.00642	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00
5.1.02.01.004.00746	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	47.808.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	111.507.933.356,25
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	80.603.812.756,25
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	640.091.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	372.620.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	916.000.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	0,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	21.500.000,00
5.1.02.02.001.00010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	5.000.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	225.450.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	736.800.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.958.247.999,92
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	164.985.000,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.657.600.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	83.250.000,00
5.1.02.02.001.00024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	21.900.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	52.800.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.415.500.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.000.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.439.600.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.563.343.600,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.004.700.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.531.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	886.840.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	27.000.000,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	39.600.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	222.620.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	36.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	105.884.700,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	828.300.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	117.654.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	277.004.763,30
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	4.924.746.191,03
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	213.810.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.316.606.502,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	88.975.000,00
5.1.02.02.001.00065	Belanja Penambahan Daya	0,00
5.1.02.02.001.00066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	76.100.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	585.060.000,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	8.600.000.000,00
5.1.02.02.001.00070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	5.000.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	220.000.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.159.720.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	192.304.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	7.678.800.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	3.264.000.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	17.912.400.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.119.279.600,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	11.776.800.000,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	199.638.000,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	638.841.600,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	300.000.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	204.000.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.200.293.000,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.908.250.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.596.022.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.015.521.000,00
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	16.500.000,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	184.000.000,00
5.1.02.02.004.00133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	140.000.000,00
5.1.02.02.004.00137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	140.000.000,00
5.1.02.02.004.00411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.439.248.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	218.148.000,00
5.1.02.02.005.00025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	45.300.000,00
5.1.02.02.005.00036	Belanja Sewa Taman	80.000.000,00
5.1.02.02.005.00041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	290.000.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	805.800.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	783.000.000,00
5.1.02.02.008.00001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	100.000.000,00
5.1.02.02.008.00008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00
5.1.02.02.008.00009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	283.000.000,00
5.1.02.02.008.00015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00
5.1.02.02.008.00020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	400.000.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	378.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	378.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.984.300.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.366.300.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	618.000.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.476.536.088,20
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.631.436.500,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	75.000.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.592.746.600,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	90.850.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	599.328.000,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	408.210.000,00
5.1.02.03.002.00096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	14.901.750,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	230.110.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	257.270.000,00
5.1.02.03.002.00133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	22.855.000,00
5.1.02.03.002.00347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	10.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	181.360.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	46.160.000,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	95.910.000,00
5.1.02.03.002.00492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	2.920.080,00
5.1.02.03.002.00493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	3.815.070,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	397.190.399,20
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	397.190.399,20
5.1.02.03.003.00032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.400.000.000,00
5.1.02.03.004.00004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0,00
5.1.02.03.004.00031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	3.400.000.000,00
5.1.02.03.004.00052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00
5.1.02.03.006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	47.909.189,00
5.1.02.03.006.00005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	47.909.189,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.099.382.440,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.099.382.440,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.844.647.440,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.957.495.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	297.240.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	558.480.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	527.430.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	518.500.000,00
5.1.02.05.001.00004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	8.930.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.050.000,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	31.050.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	28.376.600.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	28.234.400.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	27.984.400.000,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	250.000.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	142.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	112.200.000,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.298.448.406,49
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.298.448.406,49
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.298.448.406,49
5.1.03	Belanja Bunga	1.500.000.000,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.500.000.000,00
5.1.03.03.003	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	1.500.000.000,00
5.1.03.03.003.00001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	1.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.509.095.200,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.122.250.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.836.250.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.672.000.000,00
5.1.05.05.001.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	164.250.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	46.000.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	46.000.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	240.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	240.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	230.045.200,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	230.045.200,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	230.045.200,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	9.156.800.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	6.727.200.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	6.727.200.000,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.733.100.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.733.100.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	696.500.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	696.500.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	60.000.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	60.000.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	60.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2	BELANJA MODAL	94.106.344.302,18
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	0,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.459.780.912,72
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	101.600.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	101.600.000,00
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	101.600.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.550.500,00
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	16.100.000,00
5.2.02.03.001.00010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	16.100.000,00
5.2.02.03.002	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.450.500,00
5.2.02.03.002.00013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	2.450.500,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	0,00
5.2.02.03.003.00004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.094.651.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.094.651.000,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	310.671.000,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	777.240.000,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	3.000.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.740.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	0,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00
5.2.02.06.001.00003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	37.950.000,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	37.950.000,00
5.2.02.07.001.00029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	37.950.000,00
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	509.353.412,72
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	391.570.000,00
5.2.02.10.001.00001	Belanja Modal Komputer Jaringan	33.300.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	73.000.000,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	285.270.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	117.783.412,72
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	117.783.412,72
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	36.176.000,00
5.2.02.11.002	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	36.176.000,00
5.2.02.11.002.00002	Belanja Modal Elektronik/Electric	36.176.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	10.500.000,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10.500.000,00
5.2.02.18.001.00003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	10.500.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00
5.2.02.19.001.00006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	0,00
5.2.02.89.001.00002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.651.000.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.651.000.000,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.651.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.341.154.873,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.311.154.873,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.311.154.873,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.311.154.873,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.000.000.000,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.000.000.000,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	2.000.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.000.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.275.408.516,46
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	84.866.408.516,46
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	84.866.408.516,46
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	84.866.408.516,46
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	0,00
5.2.04.01.002.00004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	400.000.000,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00
5.2.04.02.001.00006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00
5.2.04.02.004.00007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	200.000.000,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	200.000.000,00
5.2.04.02.007.00006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	200.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00
5.2.04.04.001	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00
5.2.04.04.001.00005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	9.000.000,00
5.2.04.99.099	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	9.000.000,00
5.2.04.99.099.09999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	9.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
5.2.05.07.001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
5.2.05.07.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	0,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0,00
5.2.05.89.001.00002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	30.000.000,00
5.2.05.99.099	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	30.000.000,00
5.2.05.99.099.09999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	30.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.631.151.893,07
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.631.151.893,07
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.631.151.893,07
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	2.631.151.893,07
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	2.631.151.893,07
	Jumlah Belanja	803.738.295.591,00
	Total Surplus/(Defisit)	35.900.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	100.000.000,00
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	100.000.000,00
6.1.01.08.001.00001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	36.000.000.000,00
6.2.03.04.003	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	36.000.000.000,00
6.2.03.04.003.00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	36.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-35.900.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Lubuk Linggau, 30 Desember 2025

Walikota



H. RACHMAT HIDAYAT